

EDUCATION AS A PRODUCTION FUNCTION OF HUMAN RESOURCES

PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU FUNGSI PRODUKSI SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh :
Dedy Ahmad
Departemen Administrasi Pendidikan
FIP-UPI
Email : dedy_ahmad@upi.edu

Abstrak. Manusia sebagai salah satu faktor produksi perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melaksanakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan yang ingin di capai oleh suatu organisasi/institusi. Pengetahuan dan keterampilan tersebut hanya akan diperoleh melalui suatu proses pendidikan. Pendekatan tingkat pengembalian dari hasil pendidikan (*rate of return approach*), mengungkap bahwa penghasilan orang berpendidikan berasal dari investasi pendidikan, dan karena itu menilai penghasilan dianggap sebagai produk pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses produksi bagi sumber daya manusia yang mengharapkan untuk mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian bagi bangsanya di masa yang akan datang. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana pembahasan kajian ini menggunakan bentuk *desk study*. Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu fungsi produksi bagi pembangunan sumber daya manusia, karena dengan mengikuti proses pendidikan manusia akan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan apa yang diharapkannya. Hal tersebut merupakan suatu investasi bagi diri manusia itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang secara totalitas dalam rangka pembangunan dalam berbagai aspek kepentingan hidup baik untuk pribadinya maupun secara nasional dan internasional.

Kata Kunci : Fungsi Produksi, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Human Investment*

Abstract. *As one of production factors, man has to manage to have knowledge and skills. That way, the power to accomplish a series of activities relating to aims and goals of an organization can be achieved. The knowledge and skills aforementioned are gained through a merely process of education. The rate of return approach as a result of the process reveals that an income of an educated man derives from educational institution, and therefore measuring one's income is considered as a product of education. A set of education proves to be a process of production for human resources expecting to an entity of knowledge and skills to support economic growth for the nation in years to come. The method of this research is description method.*

Keywords : *Production Function, Economic Growth, Human Investment*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu bangsa tidak bisa hanya memfokuskan pada bidang-bidang yang sifatnya materil (Industri Manufaktur) untuk dijadikan acuan dalam membangun masyarakatnya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang untuk mampu bertahan seiring dengan perubahan

n-perubahan dalam berbagai sektor kehidupan.

Pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah produksi karena berhubungan dengan proses transformasi dari input yaitu sumber daya manusia dan sumber-sumber bersifat fisik lainnya, menjadi keluaran (*output*) yang berupa bertambahnya pengetahuan, dimana hasil dari proses pendidikan bagi seseorang akan memberikan nilai tambah, baik untuk kesenangan maupun sebagai investasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam dunia pendidikan yang dilihat dari sudut pandang ekonomi berfokus pada sumber daya manusia sebagai penggerak dan pelaksana atau pengatur dan yang diatur dalam menjalankan suatu proses produksi dalam pendidikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi pendidikan, proses pendidikan tersebut seharusnya mengacu kepada kebutuhan di masa yang akan datang untuk dapat menopang pembangunan manusia yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian. Manusia sebagai salah satu faktor produksi perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melaksanakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan yang ingin di capai oleh suatu organisasi

/institusi. Pengetahuan dan keterampilan tersebut hanya akan diperoleh melalui suatu proses pendidikan.

Cohn (1979:3), mengemukakan definisi ekonomi pendidikan sebagai suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat. Intinya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan

1. Proses pelaksanaan pendidikan
2. Distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan
3. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam proses pendidikan memerlukan sejumlah sumber daya lainnya disamping tenaga kerja (manusia), yaitu lahan dan modal. Lahan yang dimaksud disini adalah merupakan suatu arena atau tempat yang dapat dijadikan sarana dan prasarana

ntuk melaksanakan proses pendidikan yang mampu menciptakan hasil pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat pengguna pendidikan.

Sedangkan modal, dapat berupa uang atau sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan proses pendidikan yang mampu untuk menciptakan hasil proses pendidikan berkualitas. Proses pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu proses produksi yang akan menciptakan atau membentuk manusia untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan dibutuhkan di dalam kehidupannya untuk memperoleh kehidupan yang layak sesuai keinginan yang diharapkannya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar pembahasannya lebih terfokus sesuai dengan judul yang telah ditetapkan perlu dirumuskan pembahasannya, yaitu sebagai berikut : "*Bagaimana pendidikan sebagai fungsi produksi sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa?*"

Adapun maksud dari penulisan ini adalah memberikan penjelasan yang berkenaan dengan pendidikan merupakan sebuah proses produksi bagi sumber daya manusia yang mengharapkan untuk mempunyai bekal pengetahuan dan ketera

mpilan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian bagi bangsanya di masa yang akan datang.

1. Konsep Pendidikan Sebagai Fungsi Produksi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Pendekatan Residual* terhadap industri pendidikan, yaitu menghitung sumbangan-sumbangan dari faktor modal, input tenaga kerja, dan sumber-sumber fisik kepada pertumbuhan produksi. Dan apapun sisa keuntungan yang tertinggal (*residu*) dianggap berasal dari "faktor manusia". Sejumlah studi yang menggunakan pendekatan ini, menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan dalam produksi di negara-negara industri selama separuh abad terakhir tidak dapat ditrangkan oleh *input* modal fisik, *output* per orang/jam, atau sumber daya alam. Namun, bagian yang utama tersebut ternyata harus dianggap disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) yang terdidik.

Bank Dunia (2002:3-12) menunjukkan kontribusi pendidikan, secara relatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat variasi yang beragam. Di kawasan Amerika Utara, persentase kontribusi per tahun

cukup tinggi, yakni 25,0 persen di Amerika Serikat dan 15 persen di Kanada. Sementara di kawasan Eropa yang tertinggi mencapai 14,0 persen di Belgia dan 12,0 persen di Inggris; namun ada juga yang amat kecil seperti di Jerman dan Yunani, masing-masing 2,0 persen dan 3,0 persen. Adapun di kawasan Amerika Latin, persentase tertinggi mencapai 16,5 persen di Argentina, 6,0 persen di Honduras, dan yang paling rendah yakni hanya 0,8 persen di Meksiko. Sedangkan di kawasan Asia, juga terbilang relatif tinggi yakni 15,9 persen di Korea Selatan, 14,7 di Malaysia, dan 10,5 persen di Filipina. Kecuali di Jepang yang hanya 3,3 persen. Demikian pula di kawasan Afrika seperti Ghana, Nigeria, dan Kenya, masing-masing 23,2 persen, 16,0 persen, dan 12,4 persen.

Pendekatan tingkat pengembalian dari hasil pendidikan (*rate of return approach*), mengungkap bahwa penghasilan orang berpendidikan berasal dari investasi pendidikan, dan karenanya menilai penghasilan dianggap sebagai produk pendidikan. Konsekuensi ekonomi dari pendidikan dipelajari dengan membandingkan penghasilan orang yang b

erpendidikan 'lebih' dengan penghasilan orang yang berpendidikan 'kurang'. Maka perbedaan-perbedaan dalam penghasilan itulah (sesudah diukur dengan analisa "*cost benefit*") , dinyatakan sebagai *prosentase* keuntungan investasi dalam pendidikan, baik untuk perorangan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran dengan analisis *cost benefit* itu hampir tanpa kecuali menunjukkan bahwa dari sudut produktivitas, keuntungan dari pengeluaran pendidikan sama tingginya, dan bahkan lebih tinggi dengan keuntungan investasi di bidang lainnya.

Jenis-jenis analisis ekonomi tentang pendidikan menunjukkan pentingnya peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional suatu bangsa. Analisa seperti ini juga condong untuk menampilkan beberapa bukti yang menyarankan bahwa pendidikan adalah satu di antara syarat-syarat utama untuk mencapai tahap pertumbuhan mandiri yang berkelanjutan (*self sustaining growth*) yang dianggap sangat penting di negara-negara yang sedang berkembang. Bahkan untuk mencapai nilai penuh dari investasi dalam modal riil, investasi dalam pendidikan dipan

dang faktor sangat vital mengingat modal riil itu harus didukung oleh investasi yang cukup dalam pendidikan.

Analisis Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan dapat memberi keuntungan ekonomi yang relatif tinggi sebagaimana terlihat dalam *social rate of return*. Bahwa hasil yang diperoleh atau keuntungan ekonomi yang didapat itu lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan. Pengalaman di negara-negara sedang berkembang memperlihatkan, bahwa rata-rata *rate of return* modal manusia (*human capital*) itu lebih tinggi dibandingkan dengan modal fisik (*physical capital*). Hal ini menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan akan membuat suatu bangsa menjadi lebih produktif, karena akumulasi pengetahuan dan peningkatan keterampilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa investasi di bidang pendidikan mempunyai makna sangat positif, untuk mendorong pembangunan ekonomi suatu negara.

Pendidikan meningkatkan kem

ampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan ditingkat sosial dan ekonomi. Karena manfaatnya yang begitu luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka investasi pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan investasi (*Human investment*). Nilai modal manusia (*Human Capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*Labour Intensif*), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*Brain intensif*). Smith (1776:15) pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas kerja. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat tergantung kepada keunggulan intelegensia dan intelektual.

Investasi sebagai konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian h

ari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, 1879:34). Investasi dalam bidang sumber daya manusia (SDM) memiliki konsep yang tidak jauh dengan konsep investasi, dimana manusia juga dapat dianggap sebagai suatu entitas yang nilai lainnya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian dan keterampilan manusia dimana nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau "*Human Capital*". Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dan jalur, sumber daya manusia itu bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu atau masyarakat.

Besarnya perhatian dunia terhadap pendidikan, bisa kita simak dari pernyataan yang tertuang dalam Deklarasi HAM (PBB, 1948), Konvensi Hak Anak (PBB, 1989), Konferensi Dunia (Thailand, 1990) telah menyepakati Pendidikan Untuk Semua; Aturan standard dunia tentan

g persamaan kesempatan (PBB,1993), Konferensi Dunia tentang pendidikan kebutuhan khusus (UNESCO,1994) yang melahirkan pernyataan SALAMANCA tentang pendidikan INKLUSI lebih dari cukup untuk bicara. Berbagai deklarasi tersebut, bagi Indonesia sepertinya tidak membawa perubahan yang berarti. Semuanya sepertinya masih memprihatinkan. Gambaran data yang dipunyai belum cukup untuk dijadikan informasi yang akurat sebagai bahan membuat kebijakan. Memang, data tentang pendidikan di negara kita juga sangat miskin, sehingga bisa dimengerti bila kebijakan pendidikan kurang menyentuh permasalahan sebenarnya. Apalagi diharapkan pada upaya memecahkan masalah-masalah pendidikan di daerah dan pelosok-pelosok negeri. Kerangka Aksi Dakar (KAD) yang diadopsi pada Forum Pendidikan Dunia (Dakar, Sinegal 26-28 April 2000) meminta pemerintah agar memastikan bahwa tujuan-tujuan dan target-target Pendidikan Untuk Semua (PUS) dapat tercapai pada Tahun 2015). Sebagai anggota UNESCO Indonesia telah bersepakat dengan target PUS 2015, sehingga diperlukan kerjasama seri

us semua pihak.

Pada pendekatan korelasi menggunakan perbandingan antar negara dengan menghubungkan sejumlah petunjuk kegiatan pendidikan dengan sejumlah petunjuk kegiatan ekonomi. Harbison dan Myers (1964: 24) misalnya menyelidiki hubungan antara proporsi pendidikan formal dengan pendapatan nasional per kapita di 75 negara. Hasil-hasilnya menunjukkan korelasi yang tinggi pada semua tingkatan pendidikan. Pada tingkatan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi korelasi itu lebih tinggi daripada di tingkatan pendidikan rendah. Boman dan Anderson (1965:56) yang juga membuat perbandingan antara pendapatan nasional dan tingkatan pendidikan di sejumlah negara, menyarankan bahwa meskipun ada korelasi positif antara tingkat atau penyebaran pendidikan dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan itu tidak pasti, tetapi fleksibel.

2. Metodologi Penelitian

Kajian ini terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan hasil temuan empiris yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu kajian ini m

enggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana pembahasan kajian ini menggunakan bentuk *desk study*. Hal tersebut dilakukan karena berangkat dari permasalahan dalam lingkungan peristiwa yang telah maupun sedang berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penulisan kajian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Sebagai Fungsi Produksi Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Suatu Bangsa

Penegasan tentang proses produksi pendidikan dipandang sebagai suatu asumsi, bahwa pendidikan akan menghasilkan keluaran (*output*) sumber daya manusia/tenaga kerja yang produktif akibat adanya interaksi antara pihak departemen dan dosen dengan mahasiswa sebagai *input*, dalam prosesnya semua komponen tersebut saling berinteraksi dan menggali setiap unsur-unsur yang ada dalam setiap input hal ini terjadi karena setiap komponen input tersebut memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Sumber daya manusia (Tenaga kerja) terdiri

k dengan kualitas yang memadai merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja yang terdidik tersebut semula berasal dari hasil proses pendidikan yang mampu mengantisipasi kebutuhan untuk perkembangan zaman. Jadi nilai ekonomi pendidikan itu terletak pada sumbangannya dalam menyediakan atau memasok tenaga-tenaga kerja terdidik, terampil, berpengetahuan, dan berkompotensi tinggi sehingga lebih produktif. Lebih dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi. Kedua hal tersebut, secara psikologis, akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan. Tenaga kerja terdidik akan berpengaruh lebih signifikan lagi bila disertai penguasaan teknologi, untuk mencapai apa yang disebut dengan keunggulan kompetitif (*competitive excellence*).

Dalam jangka pendek, proses produksi pendidikan akan banyak menghabiskan biaya yang tinggi, dan tid

ak akan menerima manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Karena, pendidikan akan memperlambat terjunnya kaum muda ke dalam penduduk aktif berproduksi, bahkan mungkin akan berarti pengurangan dalam besarnya investasi produktif. Tetapi dalam jangka panjang, hasil perluasan produksi pendidikan ini akan menerima manfaat dengan meningkatnya jumlah orang muda yang terdidik dan terlatih dengan baik. Ini lambat-laun akan merubah struktur intelektual dan vokasional penduduk. Keterampilan yang lebih tinggi dari pada penduduk aktif akan memungkinkan peningkatan teknik-teknik produksi dan pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Apabila proses pendidikan dipandang sebagai suatu investasi dan negara memungkinkan menanam modal dalam pembangunan pendidikan, maka pandangan pendidikan dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibantah. Tetapi yang belum jelas ialah apakah belanjanya pendidikan mengikuti atau mendahului pertumbuhan ekonomi? Dengan demikian, walaupun pengetahuan tentang sumbangan yang erat dari industri pendidikan kepada pertum

bahan ekonomi masih belum memadai, namun cukup bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat membantu secara berarti kepada meningkatnya daya produksi, sehingga dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang dalam jangka panjang sangat memperbesar kesempatan kerja. Pendidikan juga meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga akan menghilangkan penghalang-penghalang pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan dan operasionalnya tidak terlepas dari biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat maupun orangtua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau pun membeli pendidikan bagi karyawan atau anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai investasi pada periode tertentu, dimasa akan datang harus mendapatkan penghasilan/keuntungan (*benefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (*finansial*) maupun non finansial. Dalam bentuk uang sebagai balas jasa atau produktifitas tenaga kerja dan bentuk non finansial berupa nilai-nilai, seperti meningkatkan kesehatan, keamanan atau ket

ertiban masyarakat, baik dari aspek individu, sosial, maupun ekonomi. Diakui bahwa menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dalam arti luas, sukar dikalkulasikan secara matematika sebab setiap pendidikan yang didapat oleh seseorang dibiayai oleh orang yang mendapatkan pendidikan, masyarakat dan negara. Demikian pula dengan keuntungan yang didapatkan karena seseorang yang mendapatkan pendidikan, sulit dihitung keuntungannya, tetapi dapat dirasakan oleh individu yang mendapatkan pendidikan.

Kita akui bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memacu produktivitas SDM. Pendidikan menjadikan SDM lebih bisa mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Tidaklah heran, kiranya apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Tugas berat 'Sektor Pendidikan' yang dihadapi dewasa ini sebenarnya

a telah disinyalir oleh Coomb (*The World Educational Crisis*, 1968:7-9) yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan karena muncul ketidakseimbangan peran. Namun apakah krisis moneter juga berpengaruh pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dan masih relevan dengan apa yang disinyalir Coomb? Sinyalemen Coomb menganggap bahwa krisis pendidikan disebabkan oleh empat faktor: Pertama, *'the increase in popular aspirations for education'*, yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, *'the acute scarcity of the resources'*, yang ditandai oleh kurang responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh; Ketiga, *'the inherent inertia of educational system'*, yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar dunia pendidikan; Keempat, *'the inertia of societies themselves'*, hal-hal seperti sikap tradisional, *'prestige and incentive pattern'* menghalangi optimasi upaya meningkatkan tenaga kerja pembangunan.

Dengan demikian, proses pendid

ikan yang patut diupayakan ialah mereformasi basis pendidikan yang berorientasi pada prioritas pendidikan investatif tanpa meninggalkan pendidikan yang bersifat konsumtif. Dengan demikian pelayanan pendidikan dan pelatihan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan, sudah semestinya meliputi seluruh komponen kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa dan menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, boleh saja dibedakan antara pendidikan yang menambah kemampuan berproduksi (investasi) dengan pendidikan yang tidak (konsumtif). Keduanya sangat dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Memang benar, pada umumnya orang memandang pendidikan sebagai jembatan kejenjang pekerjaan atau karier. Artinya, tekanan-tekanan sosial dan politik terhadap pendidikan itu didorong oleh motivasi ekonomi. Karena itu, dari sudut pandang pembangunan ekonomi, pendidikan untuk maksud-maksud produksi mempunyai prioritas yang tinggi.

2. Strategi Ekonomi Pendidikan Yang Perlu Diterapkan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu P

endidikan

Pendekatan tingkat pengembalian dari hasil pendidikan (*rate of return approach*), mengungkap bahwa penghasilan orang berpendidikan berasal dari investasi pendidikan, dan karenanya menilai penghasilan dianggap sebagai produk pendidikan. Konsekuensi ekonomi dari pendidikan dipelajari dengan membandingkan penghasilan orang yang berpendidikan 'lebih' dengan penghasilan orang yang berpendidikan 'kurang'. Maka perbedaan-perbedaan dalam penghasilan itulah (sesudah diukur dengan analisa "*cost benefit*"), dinyatakan sebagai prosentase keuntungan investasi dalam pendidikan, baik untuk perorangan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran dengan analisis *cost benefit* itu hampir tanpa kecuali menunjukkan bahwa dari sudut produktivitas, keuntungan dari pengeluaran pendidikan sama tingginya, dan bahkan lebih tinggi dengan keuntungan investasi di bidang lainnya.

Jenis-jenis analisis ekonomi tentang pendidikan menunjukkan pentingnya peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional suatu bangsa. Analisa seperti ini juga cond

ong untuk menampilkan beberapa bukti yang menyarankan bahwa pendidikan adalah satu di antara syarat-syarat utama untuk mencapai tahap pertumbuhan mandiri yang berkelanjutan (*self sustaining growth*) yang dianggap sangat penting di negara-negara yang sedang berkembang. Bahkan untuk mencapai nilai penuh dari investasi dalam modal riil, investasi dalam pendidikan dipandang faktor sangat vital mengingat modal riil itu harus didukung oleh investasi yang cukup dalam pendidikan.

Analisis Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan dapat memberi keuntungan ekonomi yang relatif tinggi sebagaimana terlihat dalam *social rate of return*. Bahwa hasil yang diperoleh atau keuntungan ekonomi yang didapat itu lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan. Pengalaman di negara-negara sedang berkembang memperlihatkan, bahwa rata-rata *rate of return* modal manusia (*human capital*) itu lebih tinggi dibandingkan dengan modal fisik (*physical capital*). Hal ini menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan akan membuat suatu bangsa menjadi lebih produktif, karena akumulasi penget

ahuan dan peningkatan keterampilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa investasi di bidang pendidikan mempunyai makna sangat positif, untuk mendorong pembangunan ekonomi suatu negara.

Pendidikan meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan ditingkat sosial dan ekonomi. Karena manfaatnya yang begitu luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka investasi pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan investasi (*Human investment*). Nilai modal manusia (*Human Capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*Labour Intesif*), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*Brain intensif*). Adam Smith (1776:56) pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produ-

ktivitas kerja. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat tergantung kepada keunggulan intelegensia dan intelektual.

Investasi sebagai konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengobankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, 1879:21-24). Investasi dalam bidang sumber daya manusia (SDM) memiliki konsep yang tidak jauh dengan konsep investasi, dimana manusia juga dapat dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian dan keterampilan manusia dimana nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau "Human Capital". Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dan jalur, sumber daya manusia itu bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu atau masyarakat.

Pendidikan dan operasionalnya tidak terlepas dari biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau pun membeli pendidikan bagi karyawan atau anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai investasi pada periode tertentu, dimasa akan datang harus mendapatkan penghasilan/keuntungan (*benefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (*finansial*) maupun non finansial. Dalam bentuk uang sebagai balas jasa atau produktifitas tenaga kerja dan bentuk non finansial berupa nilai-nilai, seperti meningkatkan kesehatan, keamanan atau ketertiban masyarakat, baik dari aspek individu, sosial, maupun ekonomi. Diakui bahwa menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dalam arti luas, sukar dikalkulasikan secara matematika sebab setiap pendidikan yang didapat oleh seseorang dibiayai oleh orang yang mendapatkan pendidikan, masyarakat dan negara. Demikian pula dengan keuntungan yang didapatkan karena seseorang yang mendapatkan pendidikan, sulit dihitung keuntung-

annya, tetapi dapat dirasakan oleh individu yang mendapatkan pendidikan.

Besarnya perhatian dunia terhadap pendidikan, bisa kita simak dari pernyataan yang tertuang dalam Deklarasi HAM (PBB, 1948), Konvensi Hak Anak (PBB, 1989), Konferensi Dunia (Thailand, 1990) telah menyepakati Pendidikan Untuk Semua; Aturan standard dunia tentang persamaan kesempatan (PBB,1993), Konferensi Dunia tentang pendidikan kebutuhan khusus (UNESCO,1994) yang melahirkan pernyataan SALAM ANCA tentang pendidikan INKLUSI lebih dari cukup untuk bicara. Sebagai deklarasi tersebut, bagi Indonesia sepertinya tidak membawa perubahan yang berarti. Semuanya seperti masih memprihatinkan. Gambaran data yang dipunyai belum cukup untuk dijadikan informasi yang akurat sebagai bahan membuat kebijakan. Memang, data tentang pendidikan di negara kita juga sangat miskin, sehingga bisa dimengerti bila kebijakan pendidikan kurang menyentuh permasalahan sebenarnya. Apalagi diharapkan pada upaya memecahkan masalah-masalah pendidikan di daerah dan pelosok-pelosok negeri. Kera-

angka Aksi Dakar (KAD) yang diadopsi pada Forum Pendidikan Dunia (Dakar, Sinegal 26-28 April 2000) meminta pemerintah agar memastikan bahwa tujuan-tujuan dan target-target Pendidikan Untuk Semua (PUS) dapat tercapai pada Tahun 2015). Sebagai anggota UNESCO Indonesia telah bersepakat dengan target PUS 2015, sehingga diperlukan kerjasama serius semua pihak.

Oleh karena itu, agenda pendidikan di Indonesia dewasa ini, berkenaan dengan tantangan dalam aspek kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi manajemen, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Dalam aspek kepentingan nasional, hal pertama yang perlu diantisipasi adalah pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Kondisi kabupaten/kota sangat bervariasi ditinjau dari segi kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Tantangannya adalah bagaimana melalui otonomi daerah di masing-masing kabupaten/kota dapat menjamin wajib belajar 9 tahun dapat dituntaskan, sementara potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda. Hal kedua, berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang dila-

ksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Dalam NKRI tersebut diperlukan adanya semacam *nation character building* sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya serta memiliki jiwa patriotisme, religius, dan lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis. Dengan demikian, hal yang patut diantisipasi adalah bagaimana otonomi daerah dapat mengamankan program-program pendidikan yang memberikan peluang kreativitas dan keragaman daerah, tetapi semuanya mengarah kepada kepentingan nasional.

Dalam aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai telah mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat, konon telah mencapai 40 juta, sehingga pendidikan perlu berperan aktif mengatasi masalah pengangguran ini. Dari dalam bidang pendidikan itu sendiri, diketahui terd-

apat 88,4% lulusan SLTA tidak melanjutkan ke Pendidikan tinggi, dan 34,4% lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA. Mereka perlu mendapat perhatian agar tidak menambah jumlah angka pengangguran yang sudah sedemikian besar. Kondisi-kondisi inilah yang diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. Setidaknya ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu: kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harus memenuhi standar internasional.

Dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (*technical efficiency*) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (*economic efficiency*). Pengalaman di beberapa negara seperti di Papua New Guinea dan Jamaica (Fiske, 1996:18) menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembiay

aan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personal pemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama 32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik berpotensi munculnya problem-problem efisiensi pengelolaan seperti yang dipaparkan di atas.

Dalam aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, yang pada potensial memunculkan ketimpangan dalam perolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kaya dengan umlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Dan apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi ke

sempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah. Pengalaman pelaksanaan di Chili menunjukkan bahwa meningkatnya angka putus sekolah dikarenakan orang tua tidak mampu membiayai langsung pendidikan anaknya, sementara *opportunity costs* meningkat. Pengalaman ini mirip yang terjadi dengan kondisi di Indonesia.

Dalam aspek peran serta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, atau lembaga industri atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.

Aspek terakhir ialah dalam akuntabilitas. Melalui otonomi, pengambil

keputusan yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayannya, sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing.

Upaya menyikapi beberapa tantangan tersebut, secara politis telah membuat suatu keputusan monumental yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD dan APBN sebagaimana dipaparkan pada jawaban bagian pertama. Namun sampai saat ini keputusan politis tersebut dilihat dari pendekatan *cost and benefit* masih berada pada *point of no return*. Sekalipun pada tahun 2003, anggaran pendidikan sesungguhnya—menurut salah seorang anggota Komisi VI DPR—sudah mencapai 17,9 persen atau 2,1 persen lagi untuk mewujudkan posisi perubahan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945. Persentase ini diperoleh dari besarnya anggaran Depdiknas plus anggaran

n pendidikan pada departemen/institusi lain, serta alokasi APBD untuk pendidikan. Namun, perhitungan angka-angka seperti ini cenderung telah kehilangan wawasan (*lose sight*) dalam kaitan dengan fungsi anggaran pendidikan dalam kerangka penguatan daya saing bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan, bukan sekadar sebagai kumpulan hitungan angka dan persentase, namun harus dipandang sebagai sarana ampuh untuk perwujudan kemakmuran bangsa di masa depan.

Kita akui bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitaslah yang akan bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memacu produktivitas SDM. Namun, masih banyak kalangan yang belum berkenan dengan isi perubahan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 itu. Alasannya, ekonomi Indonesia yang masih "morat-marit" belum memerlukan prioritas pada sektor pendidikan, tetapi pada sektor-sektor ekonomi untuk dapat memacu produktivitas dunia usaha.

Keberatan para pelaku ekonomi menyiratkan keinginan, jika anggarannya mencapai seperlima dari APB

N, industri pendidikan harus dibangun di atas wawasan penyiapan para pelaku ekonomi yang andal dalam aspek keahlian, profesionalitas, serta kemampuan untuk menghasilkan karya yang dapat diandalkan. Ini sungguh beralasan karena sampai saat ini industri pendidikan dituding belum dapat menghasilkan pelaku ekonomi atau pengusaha yang jangkakan memiliki kemampuan bersaing di era global, untuk survive saja mereka amat boros subsidi bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang nyaris meluluhlantakkan ekonomi sejak masa krisis sampai sekarang. Jika dirunut ke belakang, "kegagalan" pelaku ekonomi konglomerasi kita disebabkan oleh perlakuan birokrasi yang memanjakan. Kemudahan bantuan modal serta perlindungan monopoli pasar dalam negeri telah menggiring mereka menjadi jago-jago kandang yang "gagah" di dalam negeri, tetapi "loyo" dalam percaturan internasional. Wajah perindustrian kita juga buruk karena orientasi yang berjangka pendek, yaitu industri rakitan produk teknologi asing, yang untuk mengoperasionalkannya saja harus menyewa pekerja asing. Sampai dengan tahun 1997, misalnya, kita harus "mengimp

or" sedikitnya 60.000 tenaga kerja asing yang telah memboroskan devisa negara tidak kurang dari enam milyar dollar (AS) atau lima kali lipat dari anggaran pendidikan pada saat itu.

Kewajiban berat yang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikan pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apa yang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikan harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yang sekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development* (HCD) yang memiliki daya saing dan bermoral. Oleh sebab itu, pendidikan menuntut manajemen yang bersifat populis, artinya pendidikan harus disediakan buat masyarakat secara merata (*equality*) dan menjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikan harus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikan mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menja

dikan SDM lebih bisa mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Tidaklah heran, kiranya apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Tugas berat 'Kereta Pendidikan' yang dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinyalir oleh Coomb (*The World Educational Crisis*, 1968:14) yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan karena muncul ketidakseimbangan peran. Namun apakah krisis moneter juga berpengaruh pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dan masih relevan dengan apa yang disinyalir Coomb? Sinyalemen Coomb menganggap bahwa krisis pendidikan disebabkan oleh empat faktor: Pertama, '*the increase in popular aspirations for education*', yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, '*the acute scarcity of the resources*', yang ditandai oleh kurang responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh; Ketiga, '*the inherent inertia of educational system*', yang d

itandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar dunia pendidikan; Keempat, *'the inertia of societies themselves'*, hal-hal seperti sikap tradisional, *'prestige and incentive pattern'* menghambat optimasi upaya meningkatkan tenaga kerja pembangunan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara proporsi populasi di semua tingkatan pendidikan formal dengan GNP per kapita. Tetapi korelasi kuantitatif ini tidak bisa diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Karena sangat naif jika penambahan X persen dalam biaya pendidikan harus membawa kenaikan Y persen dalam pendapatan nasional. Selain pendidikan formal ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti SDA, situasi moneter internasional, stabilitas politik, teknologi, dan lainnya. Yang jelas ialah, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh timbal balik dengan pendidikan sebagai upaya investasi yang berupa peningkatan kemampuan tenaga kerja yang juga berlaku sebagai sarana pendukung laju pertumbuhan ekonomi. Upaya pendidikan

tidak mampu bertahan sebagai barang ekonomi apabila upaya pendidikan tidak dapat memuaskan kebutuhan, dia terhindar dari produksi massal, murah dan terdapat dimana-mana, tetapi sukar karena kedudukan upaya pendidikan berada sejajar dengan pendapatan sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Dengan demikian, strategi pendidikan yang patut diupayakan ialah mereformasi basis pendidikan yang berorientasi pada prioritas pendidikan investasi tanpa menenggalkan pendidikan yang bersifat konsumtif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan dalam kehidupan masyarakat modern merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pelayanan pendidikan dan pelatihan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan, sudah semestinya meliputi seluruh komponen kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa dan menuntut langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, boleh saja dibedakan antara pendidikan yang menambah kemampuan berproduksi (investasi) dengan pendidikan yang tidak (konsumtif). Keduanya sangat dibutuhkan dalam pembangunan mas

asyarakat. Namun dalam praktiknya, pada saat kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa ditarik dengan "Kereta Pendidikan" sangat sulit dipisahkan antara kepentingan seseorang sebagai produsen dari kepentingannya sebagai konsumen. Memang benar, pada umumnya orang memandang pendidikan sebagai jembatan ke jenjang pekerjaan atau karier. Artinya, tekanan-tekanan sosial dan politik terhadap pendidikan itu didorong oleh motivasi ekonomi. Karena itu, dari sudut pandang pembangunan ekonomi, pendidikan untuk maksud-maksud produksi mempunyai prioritas yang tinggi.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu fungsi produksi bagi pembangunan sumber daya manusia, karena dengan mengikuti proses pendidikan manusia akan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan apa yang diharapkannya. Hal tersebut merupakan suatu investasi bagi diri manusia itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang secara totalitas dalam rangka pembangunan dalam berbagai aspek kepentingan hidup baik untuk pribadinya maupun secara nasional dan internasional.

Penegasan tentang pendidikan seba

gai *emerging priority* sebenarnya merujuk pada kondisi fungsi dan peran pendidikan itu sendiri. Merujuk jiwa Teori *Human Capital*, pada awalnya menganggap bahwa unsur manusia dipakai sebagai faktor untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi. Pada perkembangan selanjutnya, khususnya dalam *global economy* posisi manusia tersebut menjadi tidak jelas lagi posisinya. Telah terjadi perimbangan dari *natural resources* ke *knowledge based resources*. Karena itu, dalam pertumbuhan ekonomi nasional, *knowledge* dapat dianggap infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kenyataannya tidak terbatas pada infrastruktur semata-mata, tetapi telah memasuki proses manajemen dengan menggunakan infrastruktur teknologi sebagai manifestasi dari *knowledge*. Jadi unsur *knowledge* ini sekaligus juga menjadi instrumen dalam *Human Resources Development (HRD)*.

Karena itu sudah tidak terelakan lagi (*indispensable*) bahwa cara-cara pengelolaan pendidikan harus berubah. Tugas pendidikan bukan hanya sekedar mencetak SDM yang *high quality* dan *professional* dalam arti terbatas, tetapi harus sudah berubah menjadi institusi *knowledge producing enterprise*. Berdasarkan pemikiran tersebut, modernisasi manaje

men pendidikan sudah tak terelakan lagi (*indispensable*). Tetapi dalam pelaksanaan modernisasi manajemen pendidikan, paling tidak ada tiga persyaratan untuk itu, yaitu (1) *political decision*, (2) *political commitment*, dan (3) *political action*.

Political decision, artinya sudah memiliki keberanian politik dalam mengantisipasi apa yang harus diperankan oleh Pendidikan dalam menghasilkan sumber daya yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian. *Political Commitment*, diperlukan untuk mendukung *boundary system* aktivitas manajemen yang dinamis dengan segala lapisan masyarakat. *Political Action*, merujuk tuntutan keberanian politik dari institusi yang bersangkutan untuk meninggalkan cara-cara manajemen konvensional dengan melaksanakan pola-pola kolaboratif melalui bentuk-bentuk *agreement* dan berani bersaing dengan *external organizations*.

4. DAFTAR PUSTAKA

Anderson, C. Arnold and Marie Jean Bowman. (1965). *Education and Ec*

EduTech, Tahun 14, Vol.1, No.1 Februari 2015

onomic Development, Chicago: Aldine.

A World Bank Policy Research Report. (2002). *Globalization, Growth, and Poverty*, New York: Oxford University Press.

Cohn, Elchanan. (1979). *The Economic of Education*, Revised Edition, Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Co.

Coombs, Philip H., (1968). *The World Educational Crisis: A Systems Analysis*, London: Oxford University.

Fiske, John. (1996). *Media Matters: Everyday Culture and Political Change*. Minneapolis: University of Minnesota Press

Harbison F., and C.A. Myers. (1964). *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resources Development*, New York: McGraw-Hill Book Co.

Smith, Adam. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Methuen & Co., Ltd.